DAFTAR RUJUKAN

Buku

Arba, H.M. (2015). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ginting, D. (2010). Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. Bogor: Ghalia Indonesia.

Harun, B. (2013). Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan. Yogyakarta: Pustaka Yudistia.

Handoko. 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.

Ibrahim, D.J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Prenada Media Grup.

Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Kadarudin. (2021). Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Semarang: Formaci.

Lachlan. (2012). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Limbong, B. (2012). Konflik Pertanahan. Jakarta: Pustaka Margaretha.

Muhamin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Pers.

Mulyafi, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikaat. Jakarta: Sinar Grafika.

Murad, R. (2013). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Alumni Pustaka.

Rahmi, E. (2011). Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Unpad Press.

Santoso, U . (2017). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.

Soeroso. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharsini, A. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2010). Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2014). Kegunaan Sertifikat Dan Permasalahannya. Jakarta: Op.Cit.

Sutedi, A. (2012). Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

Suwitra, I. M. (2020). Konflik Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Dibali. Denpasar: Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa.

Syarief, E. (2012). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: Kpg.

Tehupeiory, A. (2012). Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Zainal , A. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Zainudin, A. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaman, N. (2016). Hukum Politik Pengadaan Tanah. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Tambahan Lembar Negara Nomor 104 Tahun 1960)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 83 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Skripsi

Ardiansyah, G. M. (2022). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten

Banyiwangi (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi). Singaraja : Undiksha

Wolango, M. I. (2017) Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo

Jurnal

Angga, E. (2013). Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Skripsi, Vol. I, No.5, 28.

Arisaputra, A., & Bakar, A. (2017). Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 29 Nomor 2 Jun, 188.

Auri. (2014). Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I, Vol 2, 12.

Bronto, S. (2014). Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasar Kan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 20 Agustus, 162.

Entiman, F. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat. Lex Privatum, Volume 1 No.5, 54.

Haposan, S. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli, 122.

Indri, H. (2014). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. Volume 2, Nomor 1, 118.

Mulyadi, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda, Vol.6 No.1. Jurnal Yuridis, 88.

Nia, K. (2016). Mediasi Arbitraseuntuk Penyelesaian Sengketa Tanah. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember, 197.

Panget, A. E. (2013). Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda, Lex Administratum, Vol.I/No.3/Jul-Sept/2013. Lex Administratum, Vol.I No.3 Juli, 167

Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Ber Sertipikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. Jurnal Yustisia, Volume 5 No. 2 Mei, 173.

Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertipikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. Jurnal Yustisia, Vol.5 No.2 Mei 2016, 98.

Prasetyo, A. D. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1, 93.

Rahayu, D. D. (2019). Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Riswanti, I. (2022). Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.1 Maret, 47.

Rizki, K. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Jurnal Aktualita, 32.

Safitri, F. A. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang. Jurnal Notarius, Vol.13 No.2, 73.

Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. Jurnal Usm Law Review, Vo.2, No.2, 74.

Susanto, N. A . (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012. Jurnal Yudisial, Vol.7 No.3, 27.

Tata, W. (2014). Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Sertifikat. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No 2 Mei, 112.

Wijayanti, T. (2014). Asas Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No 2 Mei 2014, Hlm 216. Jurnal Dinamika Huku, Vol 14 No 2 , 216.

Zuman, M., & Adjie, H. (2017). Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 Desember, 67.

Internet

Bpnbuleleng.Id. (2020, Desember 13). Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022 Dari Https://Bpnbuleleng.Id/Profil-Kantah